



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Seleksi Pemimpin Komisi Yudisial: Penolakan DPR Dikritik
 Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2015
 Surat Kabar : Koran Tempo
 Halaman : 7

SELEKSI PEMIMPIN KOMISI YUDISIAL

PENOLAKAN DPR DIKRITIK

Panitia seleksi bakal kesulitan mencari pengganti dua kandidat yang gugur.

Francisco Rosarians
 francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dalam seleksi pemimpin Komisi Yudisial. Ketua Divisi Riset MaPPI Dio Ashar

CATATAN CALON PENGGANTI

SELAMA proses seleksi, enam orang calon pengganti kandidat pemimpin Komisi Yudisial dari unsur akademikus dicecar sejumlah catatan negatif, sebagian di antaranya berasal dari laporan masyarakat.

Wicaksana menuding Dewan, terutama Komisi Hukum, tak serius dan tidak transparan dalam uji kelayakan dan keputusan. "Uji kelayakan tak pernah dilakukan seluruh fraksi secara lengkap," kata Dio, kemarin. "Tiba-tiba menolak dua calon hasil seleksi tanpa ukuran yang jelas."

Sidang Paripurna DPR, Selasa lalu, menyentuh keputusan Komisi Hukum yang hanya menerima lima orang dari tujuh calon pemimpin KY hasil seleksi Agustus lalu. Mereka adalah dua mantan hakim Maradam Harahap dan Joko Sasmoro; dua praktisi hukum Sumartojo dan Farid Wadij; serta seorang perwakilan masyarakat, Sukma Violletta. Adapun dua calon lainnya, yakni perwakilan akademikus Harjono dan Wiwiek Awiati, ditolak.

Lima calon Komisioner Komisi Yudisial yang lolos uji kelayakan dan keputusan Sumartojo (kiri), Sukma Violletta (kedua kiri), Maradaman Harahap (ketiga kiri), Farid Wadij (kanan), dan Joko Sasmoro (kedua kanan) dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa lalu.

Dio mengatakan, *fit and proper test* pada Kamis pekan lalu paling banyak hanya diikuti delapan dari total sepuluh fraksi. Dari pantauan *Tempo* selama dua hari tes—terakhir Senin lalu—jumlah pengujian ditiup dengan jari.

Persoalan lainnya, menurut Dio, Pansel akan kesulitan mencari pengganti dua nama yang ditolak DPR. Lantaran calon tersisa juga memiliki banyak catatan negatif. "Padahal saat ini Komisi Yudisial sedang diterapkan hakim tingkat pertama yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Peradilan."

Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin mengklaim keputusan DPR, termasuk penolakan

Dua komisioner, yakni Suparman Marzuqi dan Taufiqurrohman Syahuri, menjadi tersangka dugaan pencemaran nama baik setelah mengomentari putusan hakim Saprin Rizaldi yang membatalkan penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir, Mahkamah Konstitusi mencabut wewenang KY dalam seleksi hakim tingkat pertama yang sebelumnya diatur oleh Undang-

Undang Peradilan. Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin mengklaim keputusan DPR, termasuk penolakan

terhadap Harjono dan Wiwiek, diambil secara aklasi setelah 10 fraksi memaparkan pendapat. "Integritas dan integritasnya merugikan saat menjawab dalam *fit and proper test*," kata Aziz, menjelaskan alasan penolakan terhadap kedua calon tersebut. Komisi, menurut Aziz, akan mengirim surat kepada Jokowi untuk meminta dua nama baru sebagai pengganti.

Anggota panitia seleksi calon pemimpin Komisi Yudisial, Asep Rahmat Tajat, mengatakan tujuh nama yang disodorkan timnya adalah yang terbaik dari ratusan masing-masing yang diajukan. Menurut dia, tim berencana menggelar

rapat pleno untuk memilih dua calon dari unsur akademikus sebagai pengganti Harjono dan Wiwiek.

Enam nama akademikus tersisa dalam sarungan terakhir antara lain Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Aidul Fitriadi Azhari; Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jaja Ahmad Jayus; Dekan Fakultas Hukum Universitas Eksakta Otong Rosadi; Lektor Kepala Universitas Gadjah Mada Sudijito; Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Suparman Marzuqi; dan dosen tak tetap Universitas Sahid Jakarta, Totok Winarto. "Kami akan memilih yang terbaik," kata Asep.

• MAWARDAH NUR HANIFIYAH



Aidul Fitriadi Azhari
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Catatan: Aidul dilaporkan dekat dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, termasuk menulis buku mautan Panglima ABRI tersebut berjudul *Bersaksi di Tengah Badai*. Ia dilaporkan pernah memaksa Dekan Universitas Gadjah Mada agar menerima Wiranto dalam program strata tiga.

Pembelaan: Aidul memberikan kedekatan dan ikut dalam penulisan buku Wiranto. Tapi ia membela bahwa pernah menaksikan nama Wiranto ke UGM.



Jaja Ahmad Jayus
 Ketua Komisi Yudisial Bidang Advokasi dan Sumber Daya Manusia Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Catatan: Jaja dilaporkan tak memiliki prestasi sebagai komisioner. Ia dilaporkan diam saja saat karyawan KY gelisah soal kesejahteraan. Jaja diduga masih terikat dengan sebuah kantor konsultan hukum yang didikannya.

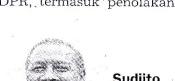
Pembelaan: Jaja mengklaim telah membuktikan kantor hukumnya. Ia mengklaim sebagai salah satu pemimpin KY yang berjuang bagi peningkatan kesejahteraan pegawai.



Otong Rosandi
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Eksakta

Catatan: Istri Otong tercatat kerap menjadi calon legislator sejumlah partai politik. Otong dituding sebagai pencari pekerjaan, berniat mendafarkan diri sebagai calon komisioner Ombudsman jika gagal dalam seleksi anggota pimpinan KY.

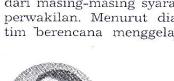
Pembelaan: Ia membenarkan diperlukan kerap menjabat sejumlah pekerjaan. Sudjito mengklaim tak tahu dana Pusat Studi Pancasila UGM bermasalah karena menurut dia sudah dipertanggungjawabkan secara jelas.



Sudjito
 Lektor Kepala Universitas Gadjah Mada

Catatan: Sudjito dilaporkan kerap mencari pelajaran karena tercatat mengampu sejumlah jabatan pada satu waktu. Ia juga dilaporkan terbeli laporan pertanggungjawaban dana Rp 350 juta saat memimpin Pusat Studi Pancasila UGM.

Pembelaan: Ia membenarkan diperlukan kerap menjabat sejumlah pekerjaan. Sudjito mengklaim tak tahu dana Pusat Studi Pancasila UGM bermasalah karena menurut dia sudah dipertanggungjawabkan secara jelas.



Suparman Marzuqi
 Ketua Komisi Yudisial Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

Catatan: Saat ini jadi tersangka dugaan pencemaran nama baik hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saprin Rizaldi.

Pembelaan: Suparman berkukuh kritis terhadap Saprin tak ditujukan terhadap pribadi, melainkan putusan hakim dalam sidang praperadilan Budi Gunawan, sesuai dengan tugas dan wewenang komisioner.



Totok Winarto
 Tenaga ahli Komisi Yudisial
 Dosen tak tetap Universitas Sahid Jakarta

Catatan: Kinerjanya di KY juga kurang terlihat.

Pembelaan: Totok mengklaim telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai tenaga ahli KY.

• FRANCISCO ROSARIANS

